

2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Agung dalam mengajukan permintaan audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada BPK RI dengan pertimbangan BPK RI telah melakukan audit atas objek yang sama sebelumnya. Audit yang dilakukan BPK pada tahun 2018 memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi, mengingat audit tersebut dilaksanakan berdekatan dengan aktivitas atau kegiatan yang di audit. Pemeriksaan dilaksanakan selama 77 hari kerja (Kantor Pusat di Jakarta) berdasarkan surat tugas Anggota BPK nomor 45/ST/IV-XV/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 membuktikan hasil audit BPKP dengan kecermatan tinggi tidak menemukan adanya kerugian. Untuk itu kejaksaan agung harus terlebih dahulu mengajukan permintaan audit tersebut kepada BPK karena kewenangan audit keuangan negara dan audit investigasi ada pada BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- a. BPKP perlu memperkuat penerapan standar audit investigatif, terutama dalam verifikasi prediksi, penetapan ruang lingkup, dan kecermatan profesional, agar hasil audit konsisten dengan ketentuan peraturan pengawasan.
- b. BPKP perlu meningkatkan mekanisme review internal sebelum laporan hasil audit diterbitkan untuk memastikan akurasi data, kesesuaian metode perhitungan, serta objektivitas simpulan.
- c. BPKP harus melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan auditor sebelumnya yang telah melakukan audit terhadap objek yang sama

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada kasus audit investigatif di sektor lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi pelaksanaan audit kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. In *Cengage Learning* (4th ed.).
- Anggara, R. P., & Hafsar, K. (2025). *Optimization Of Digital Marketing Strategies In Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu Batam City's Through Social Media*. 20(1), 53–62.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kementerian Perdagangan Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 S.D. Semester I Tahun 2017 Pada Kementerian Perdagangan Dan Instansi/Entitas Terkait*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Audit Investigatif.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Lmportasi Gula Di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 s.d. 2016.
- Berita Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Berita Negara Republik Indonesia. (2017). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
- Fajrianto, F. (2023). Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pusaran Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 29–46. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3912>
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory* (7TH ed.). WILEY.
- Hamdani. (2024). *Pengauditan Keuangan Negara* (D. Aprilyani (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Hamdani, & Misra, fauzan. (2023). The Role of Investigation Audit for the Calculation of State Losses in Governor Corruption Cases Handled by the Corruption Eradication Commission for 2013-2022 Period. *Jurnal Bina Praja*,

15(2), 249–260. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.249-260>

- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Indonesia, T. I. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: “Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan.”* <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/>
- Iyasy, A. M., & Rusydi, M. K. (2025). ANALISIS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. *Info Artha*, 8(1), 26–36.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- KabaNews. (n.d.). *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Versi BPKP Tidak Wajar: Diduga Ada Rekrutasi dan Kriminalisasi.* <https://kbanews.com/resonansi/perhitungan-kerugian-keuangan-negara-versi-bpkp-tidak-wajar-diduga-ada-rekrutasi-dan-kriminalisasi/>
- Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. (2025). Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS 06/M.1.10/Ft.1/02/2025.
- Mahkamah Agung. (2016). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., Tamam, A. M., Al, S., Bogor, H., Pascasarjana, S., Ibn, U., & Bogor, K. (2020). Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(1). <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.662>
- Mubarak, R., & Wessy, T. (2021). Determination Of State Financial Loss Due To Abuse Of The Authority Of Government Officers (Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160–173.
- Munafri, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Kerugian Keuangan Negara dalam Tidak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11, 36–51.
- Pranoto, D., & Kurniawan, T. (2023). Three years of the corruption eradication commission’s institutional reform: A narrative policy analysis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 151–164. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.943>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan

- sosial. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, 1316.
- Republik Indonesia. (2004). Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2001). Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2021). *Accounting Information Systems* (17th ed.). Person. https://www.aam-web.com/ar/subject_detail/106
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business : a skill-building approach* (Seventh). www.wileypluslearningspace.com
- Situmeang, U. M., & Susanto, D. S. (2024). Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 3056–3071. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sumarto, S., & Rahadian, Y. (2020). Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 117–129. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23866>
- Sutisna Dede, Nirwansyah Moch, Ningrum Ayu, S., & Anwar Saepul. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802–4821.
- Syahawaluna, A., Trisakti, U., Indonesia, U. I., & Negara, K. K. (2023). Metode dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BPKP Jakarta. *Transformasi*, 7, 1–22.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi* (1st ed.). Selemba Empat.